

**FORMULASI PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI DESA
PLAMPANGREJO**

(Studi di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)

Mayank Iradika Wiratama¹

Universitas Muhammadiyah Jember

Email; mayaniradika074@gmail.com

ABSTRAK

Nama : Mayank Iradika Wiratama
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : “FORMULASI PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI
DESA PLAMPANGREJO (Studi di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring
Kabupaten Banyuwangi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Formulasi Program Pembangunan Irigasi di Desa Plampangrejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, Sumber Data yang diperoleh dari Desa Plampangrejo, dan melakukan diskusi dengan Masyarakat Petani. Pengumpulan Data melalui Wawancara, Observasi, serta Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa proses kebijakan dalam fase formulasinya terdapat proses yang tidak dilakukan seperti proses pencarian masalah, pendefinisian masalah, dan spesifikasi masalah, dengan begitu disimpulkan dalam formulasi kebijakan irigasi di Desa Plampangrejo lebih dominan Desa, idealnya dalam formulasi kebijakan proses itu harus dilakukan untuk hasil kebijakan yang sehat dan ideal.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan Publik, Jaringan Irigasi.

ABSTRACT

Name : Mayank Iradika Wiratama
Study Program : Public administration
Title : PROGRAM FORMULATION OF IRRIGATION NETWORK DEVELOPMENT IN PLAMPANGREJO VILLAGE (Study in Plampangrejo Village, Cluring District, Banyuwangi Regency)

This study aims to determine the formulation of the Irrigation Development Program in Plampangrejo Village. The method used in this study is a qualitative approach, data sources obtained from Plampangrejo Village, and conducting discussions with the Farmer Community. Data Collection through Interview, Observation, and Documentation. The results of this study found that the policy process in the formulation phase there were processes that were not carried out such as the problem finding process, problem definition, problem specification funds, thus concluded that in the formulation of irrigation policy in Plampangrejo Village, the village is more dominant, ideally in policy formulation that process should be carried out. for sound and ideal policy outcomes

Keywords: Formulation, Public Policy, Irrigation Network.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Desa No 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa, untuk mendukung kebijakan terdahulu maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, pengelolaan sistem irigasi

diselenggarakan melalui azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Lebih lanjut di dukung pula oleh Permen PU No. 32/PRT/M/2007, tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan adapun kebijakan lainnya yaitu Peraturan perundangan Irigasi UU No 1 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang

Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi. Dalam distribusi air sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi, Pasal 19; (1) Rencana pembagian air pada suatu daerah irigasi ditetapkan setiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air; (2) Rencana pembagian air untuk jaringan irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi; (3) Pembagian air irigasi ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan. Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi Indonesia, terdapat beberapa pokok kebijakan salah satunya yaitu, perkuatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan menggunakan pendekatan, 1, Penyusunan konsep dan implementasi asas human capital, 2, Pembentukan lembaga koordinasi pengelolaan irigasi di aras Pusat dan Perkuatan Lembaga Koordinasi di Daerah, 3, Revitalisasi pelatihan dan sertifikasi irigas,

4, Pemberdayaan petani dan kelembagaan petani, 5, Pengembangan konsep partisipasi, 6, Pengembangan sistem informasi irigasi terpadu dan sistem monitoring dan evaluasi (ME), 7, Percepatan penerbitan aturan hukum irigasi, 8, Forum dialog irigasi, 9, Pengembangan konsep kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik maka dengan adanya undang – undang desa no 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa. Selain partisipasi 2 aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan

pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat desa Balesari dirasa cukup baik. Namun, tingkat partisipasi dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan belum terwujud dengan baik. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan. Davis (1962) mengatakan "*Participation is define as mental and emotional involment of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*". Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau

menunjang tercapainya tujuantujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun 4 pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan.

Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan, pengambilan keputusan bahkan pendanaan. Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ginanjar

Kartasmita (1996), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dalam pembangunan di tingkat daerah. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang dibutuhkan, melaksanakan program yang telah direncanakan, dan 5 menjaga/melestarikan program yang telah dilaksanakan. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, masyarakat lah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi,

dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan. Penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya di mana dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat terdapat berbagai pendapat.

Pengamatan sementara penulis dalam penyusunan program jaringan irigasi di Desa Plampangrejo kurang adanya partisipatif dari masyarakat terkait dengan serap aspirasi atau pembangunan yang berbasis penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Plampangrejo, dengan begitu, model pembangunan dan strategi kebijakan tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu Pemberdayaan petani dan kelembagaan petani, Pengembangan konsep partisipasi, dalam perumusan program jaringan irigasi keterlibatan masyarakat terbilang rendah, seringkali yang terjadi sudah dalam tahapan pengerjaan dan eksekusi program kerja dilapangan. Dengan begitu, terjadinya lompatan dalam struktur pembuatan kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang

menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai proses kebijakan jaringan irigasi di Desa Plampangrejo.

Fokus penelitian ini pada proses pembuatan kebijakan jaringan irigasi dengan tahap perumusan masalah. Kebijakan dari William N Dunn Yaitu, prosedur dari analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan menghasilkan informasi tentang memungkinkan menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya. Untuk membuat rekomendasi kebijakan juga mengharuskan kita menentukan alternatif mana yang paling baik. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuat pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi Implementasi Kebijakan. Membuat rekomendasi kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pernyataan yang harus

dijawab. Maka dari itu, analisis kebijakan menggunakan Dunn diharapkan mampu melihat hasil dari rekomendasi program yang akan di eksekusi oleh pemerintah Desa sebagai sebuah program pembangunan jaringan irigasi di Desa Plampangan. Berdasarkan Fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan Judul **"FORMULASI PROGRAM JARINGAN IRIGASI DI DESA PLAMPANGAN KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI"**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk kebijakan Perumahan Bersubsidi di Kabupaten Jember, berikut ini rumusan masalah penelitian;

1. Bagaimana Formulasi Program Jaringan Irigasi Di Desa Plampangan Kecamatan Cluring?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui dan Proses Pembuatan Program Kebijakan Jaringan Irigasi di Desa Plampangan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Menurut (Moleong 2000) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait formulasi Kebijakan Program Jaringan Irigasi di Desa Plampang Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Plampang Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi

Sumber Data

Sumber data adalah bagian dari subjek dari mana asal data diperoleh. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai

sumber maka ditetapkan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data bersumber dari responden secara langsung melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan objek yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan Perangkat Desa Plampangrejo dan Masyarakat Petani.

2. Observasi

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu

pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap proses pembuatan kebijakan dalam bentuk sebuah program pembangunan Jaringan Irigasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

III. Hasil dan Pembahasan

Perumusan Masalah

Syarat untuk memecahkan masalah yang rumit adalah tidak sama dengan syarat untuk memecahkan masalah yang sederhana. Masalah yang sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode metode konvensional, sementara masalah yang rumit menuntut analisis mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan hakikat dalam masalah itu sendiri. peneliti menemukan argumen atau

pendapat yang kontradiktif dari pihak desa dan masyarakat yang tergabung dalam P3A.

Pencarian Masalah

Peneliti menelisik lebih dalam mengenai perumusan masalah dimulai dari pencarian masalah yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Plampanganrejo Kecamatan Cluring. Pencarian masalah terjadi miskomunikasi sehingga terjadi perbedaan pendapat dari kedua informan, pendapat peneliti seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam perumusan masalah suatu program, karena program yang disusun oleh pemerintahan desa harus harus menjawab masalah yang itu terjadi di masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat atau menjunjung partisipatif masyarakat.

Pendefinisian Masalah

Pendefinisian masalah merupakan fase selanjutnya dalam perumusan masalah setelah pencarian masalah, hal ini dilakukan untuk mengklasifikasi masalah yang telah ditemukan atau telah menyusun *mapping problem*. penyusunan program jaringan irigasi dalam perumusan masalahnya kurang begitu serius atau dibahas secara mendalam, menurut peneliti pendefinisian masalah merupakan bagian

penting dan tidak boleh terlewatkan, karena fase ini menentukan bagaimana masalah itu harus di selesaikan dan memunculkan sebuah rekomendasi program untuk menjawab masalah itu sendiri, maka, tidak heran jika sering terjadi kesalahan dalam pembuatan program karena kesalahan dalam pendefinisian masalah.

Spesifikasi Masalah

Selanjutnya yaitu merumuskan masalah lebih rinci dan spesifik, perumusan masalah lebih rinci dan spesifik inilah spesifikasi masalah, tugas utamanya untuk mendefinisikan sifat dari masalah itu sendiri, 'menurut peneliti mendefinisikan sifat masalah itu sendiri merupakan proses kualifikasi masalah atau juga disebut prioritas masalah yang harus diselesaikan dan dipecahkan terlebih dahulu, peneliti berpendapat meskipun spesifikasi masalah telah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa tetap saja serangkaian perumusan masalah dalam formulasi kebijakan tidak bisa dilewatkan karena dari fase awal sampai akhir merupakan serangkaian fase yang saling berhubungan atau berkaitan.

Pengenalan Masalah

Fase terakhir merupakan pengenalan masalah, fase inilah dimana uji publik masalah dilakukan untuk melakukan penetapan masalah yang selanjutnya akan dilakukan penyusunan rekomendasi program, perumusan masalah kebijakan dianalisis dari teori Willian N Dunn pemerintah desa Plampangrejo belum begitu baik, hal itu disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, pelibatan masyarakat dalam perumusan masalah masih cenderung lemah padahal dari fase pencarian masalah harus menyentuh sampai dengan subsistem untuk benar benar menemukan permasalahan yang sangat mendasar, *kedua*, dari berbagai fase perumusan masalah masih ada fase yang tidak dilakukan yaitu fase pendefinisian masalah.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan program pembangunan jaringan irigasi masih belum begitu baik hal dianalisis dari perumusan masalah kebijakan yang buat oleh pemerintah desa Plampangrejo Kecamatan cluring dengan menggunakan teori analisis kebijakan William N Dunn;

1. **Pencarian Masalah:** pencarian masalah terjadi miskomunikasi sehingga terjadi perbedaan pendapat dari kedua informan, pendapat peneliti seharusnya hal seperti itu tidak boleh terjadi dalam perumusan masalah suatu program, karena program yang disusun oleh pemerintahan desa harus harus menjawab masalah yang itu terjadi di masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat atau menjunjung parsipatif masyarakat.
2. **Pendefinisian Masalah:** penyusunan program jaringan irigasi dalam perumusan masalahnya kurang begitu serius atau dibahas secara mendalam, menurut peneliti pendefinisian masalah merupakan bagian penting dan tidak boleh terlewatkan, karena fase ini menentukan bagaimana masalah itu harus di selesaikan dan memunculkan sebuah rekomendasi program untuk menjawab masalah itu sendiri, maka, tidak heran jika sering terjadi kesalahan dalam pembuatan program karena kesalahan dalam pendefinisian masalah.
3. **Spesifikasi Masalah:** spesifikasi masalah telah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa tetap saja serangkaian perumusan masalah dalam formulasi kebijakan tidak bisa dilewatkan karena

dari fase awal sampai akhir merupakan serangkaian fase yang saling berhubungan atau berkaitan

Pengenalan Masalah; pengenalan masalah dilakukan oleh pemerintah desa plampanganrejo meskipun terdapat pernyataan yang kontradiktif dari berbagai informan, sehingga menurut peneliti formulasi yang dilakukan pemerintah desa plampangrejo kurang begitu baik.

SARAN

Saran peneliti kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk mempertajam dengan mengkaji lebih dalam tentang teori *analisis kebijakan*, terlebih dalam analisis dalam perumusan masalah kebijakan sebelum terbentuknya kebijakan itu sendiri, karena perumusan masalah merupakan tahap pertama dalam perumusan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Air, Direktorat Jendral Sumber Daya. 2018. "Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Di Indonesia 2018." *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*: 1–37.
- Hidayat, Dosi Kusmawandi. 2021. "Pengaruh Implementasi Kebijakan

- Pengelolaan Irigasi Dan Koordinasi Terhadap Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Bandung.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 2013–15.
- Ibrahim, Lili Afrylia, Welson M. Wangke, and Melsje Y. Memah. 2017. “Partisipasi Anggota P3a Dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi.” *Agri-Sosioekonomi* 13(2A): 219.
- Moleong, Lexy J. 2000. “Metode Penelitian Kualitatif.”
- Rustam, Samsu, Sahibo, Pariyanti. 2001. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Distribusi Air Guna Meningkatkan Produksi Padi Sawah Di Daerah Irigasi Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.” (77): 1438–49.
- Snyder, Hannah. 2019. “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines.” *Journal of Business Research* 104(July): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Sururi, Ahmad. 2020. “Efektivitas Implementasi Program Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Di Kabupaten Lebak.” *Pamator Journal* 13(1): 95–104.
- Buya Hamkah, *Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Tersierdi Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa*
- Nurfaigah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bulukumba*
- Moleong, Lexy J. 2000. “Metode Penelitian Kualitatif.”
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Pres.